**BAB IV**

**BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN MASYARAKAT**

1. **PENDAHULUAN**

Berdasarkan sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (2)) disebutkan bahwa Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa, hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1.

Guna mempercepat pembangunan disegala bidang, maka upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan Pemerintah Desa di seluruh Indonesia bersifat mutlak. Beberapa tugas dari pemerintah desa adalah membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, inovasi diperlukan pemerintah desa sebagai langkah strategis dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan bersih. Selain itu, prinsip-prinsip *Good Governance* juga harus dilaksanakan dengan benar.

*Good Governance* merupakan suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan demokrasi serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal *framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Pada awalnya, *Good Governance* digunakan dalam dunia usaha (*corporate*) namun karena adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen professionalnya, maka ditetapkan *Good Corporate Governance*. Sehingga dikenal beberapa prinsip utama dalam *Governance* korporat yaitu transparansi, akuntabilitas, *fairness*, responsibilitas, dan responsivitas

United Nation Development Program (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengajukan karakteristik good governance sebagai berikut (Sedarmayanti, 2012):

1. Partisipasi (*Participation*): setiap warga masyarakat memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentinganya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Aturan hukum (*Rule of law*): Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang status seseorang, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*): Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. Daya tangkap (*Responsiveness*): Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*): Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan kebijakan maupun dalam prosedur-prosedur
6. Berkeadilan (*Equity*): Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. Efektivitas dan Efisien (*Effectiveness and Efficiency*): Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan keputusan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia
8. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Visi Strategi (*Strategy Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif good governance dalam pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini

Saat ini banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menciptakan pelayanan yang baik dalam mengelola urusan-urusan publik dengan baik dan benar. Namun banyak para aparatur desa yang kurang mengerti bagaimana cara penerapan pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan pelayanan secara maksimal dengan cara menggunakan prinsip-prinsip dari *good governance* tersebut. Pada dasarnya penerapan konsep *good governance* yang baik akan menimbulkan pemerintahan yang baik pula, namun ketika *good governance* tersebut tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya maka pemerintahan tersebut akan membawa dampak yang buruk bagi kinerja pegawai dan banyak sekali terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tentu didukung oleh peningkatan *skill* dan pengetahuan perangkat desa yang mutlak adanya. Perangkat desa harus mampu menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu perwujudan inovasi dalam menyelesaikan masalah layanan administrasi kependudukan, keuangan, pertanahan, perpajakan sehingga memperoleh *output* berupa pelayanan prima (cepat, tepat dan akurat). Selain itu peran aktif masyarakat desa juga wajib ada guna memonitoring setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan usaha-usaha tersebut, diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Permasalahan terkait mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* diantaranya adalah kebijakan yang dirasakan kurang tepat sasaran dan kurang aspiratif, respon penyelenggara pemerintahan desa belum optimal terhadap berbagai persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui perangkat desa dalam hal pelayanan publik yang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian, maka KKM Universitas Bina Bangsa Kelompok 43 di Pulau Panjang ini menyusun program kegiatan yang dilaksanakan dengan model pelatihan, penyuluhan dan pendampingan kepada aparat desa, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

1. **PERMASALAHAN YANG DIALAMI MASYARAKAT PULAU PANJANG DALAM PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN PUBLIK**

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan yang lakukan bahwa aparatur pemerintahan desa yang terlibat, pengelolaan keuangan desa masih mengalami kesulitan dalam hal mengelola dana desa (seperti membuat perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa) terutama dalam penggunaan teknologi informasi yang ada. Secara terperinci permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* adalah:

1. Kebanyakan pengelola dana desa tersebut belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai terhadap manajemen keuangan desa.
2. Belum optimalnya penyelesaian surat menyurat sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mengurusi surat menyurat. diakibatka karena kurangnya pengetahuan tentang Aplikasi *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel* dalam surat menyurat
3. Kurangnya pengetahuan dari perangkat desa tentang penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya bidang administrasi.
4. Partisipasi masyarakat dirasa kurang dalam pengunaan dana desa hanya orang-orang tertentu yang ikut berpatisipasi disebabkan SDM masyarakat yang rendah sehingga masyarakat tidak mengetahui pentingnya berpatisipasi.
5. **UPAYA PENYELESAIAN MASALAH YANG DIALAMI MASYARAKAT PULAU PANJANG DALAM PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN PUBLIK**

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka KKM Universitas Bina Bangsa Kelompok 43 dengan Bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan menyusun sejumlah program kegiatan dalam bidang pemerintahan desa dan pelayanan publik dengan melaksanakan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan sebagai usaha untuk meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di Pulau Panjang. Secara detail kegiatan yang dilakukan KKM Universitas Bina Bangsa Kelompok 43 adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa.



**Gambar 4.1 Pelatihan Tata Cara Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa**

1. Pemberian materi tentang surat menyurat dan pendataan ulang data penduduk guna keperluan tertib administrasi serta pelatihan tentang aplikasi *Microsoft Office Word* dan *Microsoft Office Excel*.
2. Pemberian materi tentang Mail-Merge File (Koneksi Word dan Excel), Pemberian materi tentang Database sederhana Pemberian materi tentang Internet
3. Pemberian materi tentang sistem informasi data desa. Pemberian materi tentang sistem informasi data Pembangunan Desa



**Gambar 4.2 Pelatihan Microsoft Word dan Excel**

Metode pelaksanaan program kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan/*workshop* dan praktik/latihan serta tanya jawab terkait dengan pengelolaan keuangan desa dan pelatihan penggunaan aplikasi *Microsoft Office Word* dan *Microsoft Office Excel*. Kegiatan seperti ini dirasakan sangat perlu bagi aparatur pemerintahan desa, mengingat kurangnya pengetahuan mereka terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa serta dalam menggunakan aplikasi *Microsoft Office Word* dan *Microsoft Office Excel*. Adapun materi penyuluhan dan pelatihan yang diberikan adalah perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, keuangan desa, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa, serta diakhiri dengan latihan dan tanya jawab. Sedangkan materi pelatihan aplikasi *Microsoft Office Word* adalah sebagai berikut :

1. Membuat Dan Menyimpan Dokumen Kerja, Menjalankan Microsoft Word
2. Pengenalan Interface/Tampilan Word, Membuat Dokumen Baru Dalam Microsoft Word, Menyimpan Dokumen Kerja, Menutup Dokumen Kerja
3. Mengedit Dokumen Kerja Dan Memformat Huruf, Membuka Dokumen Kerja Yang Telah Di Simpan, Memilih Teks Yang Akan Di Format/Edit, Memindahkan Dan Menduplikasi Teks dan Memformat Huruf/Font, Mengatur Perataan Paragraf, Membuat Numbering, Membuat Bullet, dan Mengatur Jarak Baris/Spasi Baris, Mengatur Jarak Paragraf, Orientasi Halaman Dan Menyisipkan tanggal
4. Mengatur Jarak Antar Paragraf, Mengatur Jarak Indentasi (Jarak Teks Terhadap Margin), Mengatur Margin, Ukuran Dan Orientasi Halaman/ Page Size, Menambahkan tanggal dalam dokumen
5. Mencari Teks, Halaman, Menggabungkan Dokumen Dan Menggunakan Format Kolom., Mencari (Find) Dan Mengganti (Replace) Teks, Berpindah Ke Halaman Tertentu, Menggabungkan Dua Dokumen Atau Lebih, Bekerja Dengan Header & Footer Dan Menyisipkan Simbol Dan Nomor Halaman
6. Membuat dan menghapus Header Dan Footer, Menyisipkan Simbol, Menyisipkan Nomor Halaman, Mencetak Dokumen Dengan Format Tertentu, Membuat Dan Menghapus Tabel, Konversi Teks Ke Tabel Dan Tabel Ke Teks
7. Membuat Tabel, Menghapus Tabel, Mengkonversi Table Ke Teks, Mengkonversi Teks Ke Tabel, Memanipulasi Tabel, Mengatur Border Dan Shading Tabel
8. Menyisipkan dan menghapus Baris Dan Kolom Pada Tabel, Mengatur Tinggi Baris Dan Lebar Kolom, Menggabungkan Dan Memisahkan Baris Dan Kolom Tabel

Materi yang disampaikan dalam pelatihan aplikasi *Microsoft Office Excel* adalah sebagai berikut :

1. Mengenal Program Microsoft Excel, macam-macam data dalam Program Microsoft Excel, Menyisipkan kolom, baris, cell dan lembar kerja Microsoft Excel
2. Jenis Alamat cell dalam program Microsoft Excel, Fungsi Tanggal dan Waktu, Fungsi Logika dan mengerti penerapan rumus tersebut dalam soal, Fungsi campuran Logika IF,AND dan OR
3. Mengatur setup halaman pada lembar kerja Microsoft excel, Memberi header dan footer pada lembar kerja, Mengatur sheet pada lembar kerja, Mengerti tentang fungsi vlookup
4. Mengenal fungsi campuran vlookup dan string, Menggunakan fungsi v/Hlookup, Menggunakan conditional formatting
5. Membuat grafik serta mempercantik tampilan grafik, Menyaring data dengan fasilitas auto filter, Mencetak document dan pengaturan Security Excel

Dengan program kegiatan yang telah disusun mahasiswa KKM Universitas Bina bangsa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perangkat desa akan pentingnya penyusunan keuangan darah sesuai dengan peraturan agar terhindar dari pelanggaran pidana, terbentuknya *skill* perangkat desa dalam penggunaan aplikasi *Microsoft word* dan *Microsoft excel* untuk mendukung percepatan pelayanan publik serta *skill* dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Program kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak atau manfaat bagi aparat desa, diantaranya memperoleh ilmu pengetahuan baru yang bersifat positif terhadap pembangunan desa. Setelah terlaksananya kegiatan ini, perangkat desa dan masyarakat dapat bersama-sama menjalankan pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*

1. **KESIMPULAN HASIL PROGRAM KEGIATAN**

Program kegiatan mahasiswa KKM Universitas Bina Bangsa kelompok 43 yang sudah dilaksanakan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, kemampuan dan kepercayaan masyarakat di Pulau Panjang terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sehingga aparatur desa akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk mengembangkan diri. Dengan adanya kegiatan ini juga dapat menambah kemampuan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi terutama keterlibatannya dalam proses membangun penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Pelaksanaan program kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik ini berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang signifikan, untuk antusias perangkat desa dalam kegiatan juga sangat tinggi. Dari kegiatan penyuluhan, pendampingan dan pelatihan serta hasil diskusi setelah penyampaian materi, terjadi sesi tanya jawab yang diikuti dengan sangat antusias oleh para peserta, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini tercapai. Ketercapaian materi pada kegiatan ini cukup baik. Materi yang telah tersampaikan adalah tentang penerapan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.



**4.3 Sesi Tanya Jawab Dengan Narasumber**

Pemerintahan Desa Pulau Panjang sudah menerapakan sistem transparasi dalam tata kelola pemerintahanya akan tetapi wadah untuk menyampaikan ke semua masyarakat tentang hasil-hasil dana yang di peroleh oleh desa dan kegunaanya itu belum optimal, pemerintah Desa hanya menyampaikan di dalam rapat yang sering di sebut musrenbangdes, akan tetapi jika ada masyarakat yang ingin mengetahui tentang sumber dana dan kegunaanya serta pertanggungjawabannya, pemerintah desa selalu siap menujukannya secara terperinci, namun secara garis besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah dipasang dalam bentuk Baliho maupun dalam bentuk lainnya.

Pemerintah Desa Pulau panjang selalu melibatkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk partisipasi masyarakat Pulau Panjang diantaranya adalah partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, partisipasi politik dan partisipasi dalam berbagai kegiatan atau program desa. Partisipasi masyarakat ini biasanya ditampung dalam sebuah rapat yang dinamakan Musrengbangdes. Partisipasi masyarakat di Pulau Panjang sudah cukup bagus artinya dalam proses politik, seperti pemilihan Kepala Desa dan berbagai kegiatan desa masyarakat selalu ikut campur didalamnya contohnya kerja bakti, pembagunan infrastruktur desa (jalan desa, parit dll). Akan tetapi untuk partisipasi masyarakat dirasa sangat kurang dalam penggunaan dana desa hanya orang-orang tertentu yang ikut berpatisipasi di karenakan SDM masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak tahu pentingnya berpatisipasi. Dengan adanya program kegiatan penyuluhan dan pendampingan dari KKM Universitas Bina Bangsa Kelompok 43 ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa sehingga masyarakat dan aparatur desa dapat bersinergi dengan baik. Pelatihan aplikasi *Microsoft word* dan *Microsoft excel* diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mendukung percepatan pelayanan publik yang selama ini juga menjadi kendala di Pulau Panjang. Sehingga dapat membantu perangkat desa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk meningkatkan keterampilan dan peningkatan pengetahuan serta kapasitas Sumber Daya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan program kegiatan ini dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang diperoleh oleh aparat pemerintah desa Pulau panjang adalah mengembangkan pemahaman dan kemampuan (*skill*) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Sedangkan bagi masyarakat manfaat yang diperoleh adalah peningkatan pengetahuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*